

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Literatur

Dalam melakukan penelitian, peneliti meninjau perbedaan dan persamaan penelitian peneliti dengan peneliti lain. Menurut John W. Creswell tinjauan literatur merupakan suatu sub bab yang menyajikan ringkasan dari artikel-artikel jurnal, buku, serta sumber lainnya yang menguraikan teori dan informasi yang relevan, baik dari masa lalu maupun saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengorganisir dan menyusun informasi-informasi tersebut berdasarkan topik tertentu yang dibutuhkan untuk menyusun proposal penelitian (Muhanam, 2021).

Literatur pertama yang peneliti gunakan adalah karya Anna Kim dengan judul “*Understanding Japan–South Korea Cooperation and Friction Through Neoclassical Realist Theory*” dari *Jadavpur Journal of International Relations*. Bahan pustaka ini membahas mengenai kolaborasi dan gesekan antara Jepang dan Korea Selatan dengan perspektif teori realis neoklasik. Kim menjelaskan bahwa kerjasama dapat diartikan sebagai bentuk dukungan yang kokoh terhadap sekutu selama situasi darurat untuk bersatu melawan musuh. Hal ini melibatkan komitmen material dan verbal sesuai dengan harapan sekutu, serta usaha untuk menghindari sengketa sengaja mengenai isu-isu yang dapat memicu perselisihan. Kim juga mencatat bahwa hubungan antara Jepang dan Korea Selatan sulit dijelaskan Secara teoritis, terutama terkait dengan

ketidakstabilan yang berkelanjutan. Meskipun sengketa mereka banyak terkait dengan sejarah kolonial masa lalu, sejarah itu sendiri tidak sepenuhnya menjelaskan ketegangan dan ketidakcocokan dalam kerjasama mereka. Teori *balance of threat* menunjukkan bahwa negara-negara akan bersekutu untuk melawan ancaman yang sama, tetapi hubungan antara Jepang dan Korea Selatan tidak selalu mengikuti pola ini, bahkan ketika tingkat ancaman regional meningkat. Teori aliansi, yang menekankan peran pihak ketiga sebagai pelindung dan tingkat keterlibatannya dalam sekutu, juga tidak selalu tercermin dalam hubungan bilateral mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menguji prediksi dari teori ini dengan menganalisis persepsi Jepang dan Korea Selatan terhadap keterlibatan Amerika Serikat selama pemerintahan Obama dan Trump. Selanjutnya, penelitian ini mencoba memahami apakah tindakan kedua negara tersebut mencerminkan prediksi dari teori tersebut. Kesimpulan penelitian menyoroti implikasi teori ini dalam menghadapi fluktuasi hubungan bilateral yang terjadi belakangan ini. (A. Kim, 2020).

Literatur kedua adalah “Kebijakan Nuklir Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Kim Jong-Un Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Internasional” yang ditulis oleh Matheo Manoe, Triesanto Romulo Simanjuntak, dan Putri Hergianasari dari *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Penelitian ini mengevaluasi kemajuan program nuklir Korea Utara dan implikasinya terhadap stabilitas internasional. Serangkaian penelitian ini memeriksa dampak kebijakan nuklir Korea Utara terhadap tata kelola internasional, terutama karena negara tersebut

menjadi sorotan global sebagai pemilik senjata nuklir yang mengancam stabilitas dunia. Uji coba senjata nuklir oleh Korea Utara menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Asia Timur dan secara global, berpotensi mengganggu keamanan dan menimbulkan konflik baik dalam skala bilateral maupun multilateral. Meskipun pemerintah Korea Selatan telah berusaha menyelesaikan ketegangan melalui diplomasi, beberapa politisi mengusulkan opsi untuk mengembangkan senjata nuklir secara mandiri sebagai respons terhadap ancaman dari Korea Utara. Konsep "nuklir untuk nuklir" dianggap sebagai solusi yang tepat dan mendapat dukungan signifikan. Kesempatan untuk penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Korea Selatan juga membuka peluang bagi Korea Selatan untuk mengembangkan senjata nuklir. Di sisi lain, Jepang, yang sebelumnya menolak proliferasi nuklir setelah tragedi Hiroshima dan Nagasaki, kini melihat pengembangan senjata nuklir secara independen sebagai suatu kebutuhan. Ancaman dari Korea Utara, pertumbuhan pengaruh Tiongkok, dan penurunan komitmen Amerika Serikat di Jepang menjadi dasar bagi Jepang untuk mengadopsi konsep nuclear deterrence. Ancaman nuklir dari Korea Utara tidak hanya berdampak langsung pada penyebaran senjata nuklir di wilayah tersebut, tetapi juga dapat memperburuk security dilemma di negara-negara Asia Timur, mengancam keseimbangan regional. Ancaman ini dapat memperkuat aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang, yang mungkin menimbulkan kekhawatiran bagi Tiongkok. Dampak ini dapat mendorong Tiongkok untuk mengembangkan senjata nuklir sebagai langkah deterrence terhadap

Amerika Serikat dan Jepang. Tanggapan Amerika Serikat, seperti peningkatan kehadiran militer di kawasan, dapat meningkatkan ketegangan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Hasil penelitian, dengan menggunakan teori realisme defensif dan balance of power, menunjukkan bahwa Korea Utara mengembangkan senjata nuklir sebagai bentuk deterrence untuk mencegah serangan dari negara lain. Namun, perilaku agresif Korea Utara dalam pengembangan nuklir dan rudal dapat mengganggu stabilitas balance of power, memicu keadaan security dilemma di antara negara tetangganya (Manoe et al., 2020).

Literatur ketiga, peneliti menggunakan “Upaya Peluncutan Senjata Nuklir Korea Utara Oleh Amerika Serikat 2016 – 2019” yang ditulis oleh Mohammad Jody Kusuma dan Sylvia Octa Putri dari *Global Political Studies Journal*. Penelitian ini mengeksplorasi langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan dari senjata nuklir Korea Utara. Dalam kerangka ini, Presiden Trump mengusulkan kebijakan yang dikenal sebagai "Maximum Pressure and Engagement" terkait dengan isu nuklir Korea Utara. Pendekatan ini melibatkan pemberlakuan tekanan yang intensif pada Korea Utara, termasuk ancaman verbal, sanksi ekonomi, pelaksanaan latihan militer, dan tindakan lainnya.

Langkah selanjutnya setelah fase tekanan awal adalah fase Engagement, yang mencoba membujuk Korea Utara untuk bergabung dalam perundingan yang sulit untuk diabaikan setelah tekanan intensif dilakukan. Penting dicatat bahwa kebijakan Presiden Trump menekankan bahwa upaya Engagement hanya dapat diambil jika Korea Utara

merasakan tekanan yang signifikan dari berbagai pihak. Fokus utama Engagement adalah mencapai denuklirisasi Korea Utara, yaitu penghapusan seluruh senjata nuklir, dengan Amerika Serikat tetap menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakui Korea Utara sebagai pemegang senjata nuklir.

Selain itu, pertemuan tersebut diharapkan mendapat perhatian dari organisasi internasional dan negara-negara sekutu Korea Utara, termasuk China. Meskipun langkah-langkah Amerika Serikat dalam menanggapi isu nuklir Korea Utara diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan mencegah potensi penggunaan senjata nuklir oleh Korea Utara, peluncuran senjata nuklir oleh Amerika Serikat terhadap Korea Utara justru memberikan insentif kepada Korea Utara untuk meningkatkan uji coba nuklir mereka. Ini karena, dari perspektif Korea Utara, tindakan tersebut menciptakan persepsi ancaman terhadap negara mereka. Penelitian ini mengadopsi teori nation interest dan denuclearization untuk menjelaskan bahwa kebijakan ini mengalami kegagalan, terutama karena tidak adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Korea Utara serta ketidakjelasan mengenai motivasi di balik pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara. (Kusuma & Putri, 2021).

Literatur keempat, peneliti menggunakan jurnal “Kerjasama *General Security Of Military Information Agreement* (GSOMIA) Korea Selatan – Jepang 2016: Perspektif Korea Selatan” dari Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan yang ditulis oleh Ngafifatul Khanafi dan Erna Kurniawati. Penelitian ini membahas pandangan Korea

Selatan terhadap keterlibatan dalam kerjasama GSOMIA pada tahun 2016. Menurut penjelasan dari Khanafi dan Kurniawati, keputusan Korea Selatan untuk bergabung dalam kerjasama GSOMIA dipandang sebagai respons terhadap keterbatasan kekuatan militer mereka, terutama jika dibandingkan dengan kemajuan program nuklir Korea Utara. Oleh karena itu, mereka melihat perlunya kerjasama internasional, seperti GSOMIA, untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat perkembangan nuklir Korea Utara. Penelitian ini mengadopsi teori Model Rational Actor yang dikembangkan oleh Graham T Allison. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian menyimpulkan bahwa ketika pembuat kebijakan Korea Selatan mempertimbangkan kerjasama dengan negara lain, mereka didorong oleh sejumlah alasan yang menjadi dasar pertimbangan mereka. Sebagai aktor yang rasional, pembuat kebijakan mengakses berbagai informasi, kemudian menganalisis untung-rugi dari setiap opsi kebijakan yang mungkin, sehingga mereka dapat memutuskan satu kebijakan tertentu. Oleh karena itu, Model Rational Actor, seperti yang diwakili oleh seorang presiden, memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini juga mencatat bahwa perbedaan dalam kepemimpinan dapat menghasilkan kebijakan yang berbeda, meskipun situasinya sama. Ini disebabkan oleh pertimbangan yang berbeda dari masing-masing aktor sesuai dengan pemikiran rasional yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Dalam konteks hubungan internasional, proses pengambilan keputusan tersebut memiliki relevansi penting karena

menjadi bagian dari perilaku negara sebagai pelaku dalam hubungan internasional. (Khanafi & Kurniawati, 2023).

Literatur kelima, peneliti menggunakan karya Dwi Ardiyanti, Hesti Rokhanyah, dan Sindi Dini Danae dari *International Journal of Educational Research & Social Sciences* dengan judul “*Impact Of GSOMIA (General Security Of Military Information Agreement) Treaty Bilateral Military Cooperation Between Japan and South Korea*”. Penelitian ini membahas Penelitian ini akan mengevaluasi dampak GSOMIA (General Security of Military Information Agreement) terhadap dinamika hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan, menilai apakah berdampak positif atau malah memperburuk hubungan kedua negara. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti, dkk., fokus pada awal terbentuknya GSOMIA dan menganalisis perspektif baik Jepang maupun Korea Selatan. Proses pengambilan keputusan terkait kerjasama GSOMIA antara kedua negara dianggap kompleks, terutama menghadapi beberapa hambatan domestik di Korea Selatan pada tahun 2012. Namun, akhirnya, kedua negara setuju untuk bekerja sama dalam kerangka kebijakan luar negeri mereka. Kesepakatan ini bertujuan untuk melindungi keamanan nasional dan kesejahteraan dari ancaman senjata nuklir yang terus berlanjut dari Korea Utara. Kesepakatan GSOMIA dianggap saling menguntungkan. Korea Selatan mendapatkan manfaat dari teknologi militer Jepang, termasuk pesawat patroli laut, satelit intelijen, dan kapal perusak yang dapat memantau dan melindungi dari potensi pengembangan senjata nuklir Korea Utara, terutama yang melibatkan kapal selam.

Sebaliknya, Korea Selatan memberikan informasi intelijen kepada Jepang melalui pesawat pengintai dan informasi dari para pembelot Korea serta intelijen kapal selam. Kesepakatan ini membentuk jaminan keamanan nasional dengan saling pertukaran informasi mengenai ancaman nuklir, seperti pemberian informasi oleh Jepang kepada Korea Selatan tentang jatuhnya rudal, dan sebaliknya, Korea Selatan memberikan informasi tentang peluncuran rudal kepada Jepang. Selain itu, perjanjian GSOMIA membantu memperbaiki dinamika hubungan bilateral yang sebelumnya tegang karena konflik sejarah yang belum terselesaikan. Implementasi perjanjian ini merestorasi hubungan bilateral kedua negara dan membangun saling kepercayaan, yang pada akhirnya meningkatkan kerjasama di bidang pertukaran informasi dan keamanan. Keberhasilan kesepakatan ini memberikan contoh positif bagi negara-negara di kawasan, menunjukkan bahwa meskipun terdapat konflik sejarah, keamanan dan stabilitas di kawasan dapat menjadi prioritas bersama yang lebih penting. Menurut Ardiyanti, dkk., kesediaan Jepang untuk menerima kembali Korea Selatan dalam kerjasama GSOMIA didorong oleh keinginan untuk membangun kepercayaan di antara negara-negara di kawasan, dimulai dengan Korea Selatan melalui GSOMIA. Faktor lain yang memainkan peran adalah kekurangan alutsista Jepang untuk menahan serangan dari Korea Utara, sehingga kerjasama GSOMIA dianggap penting. Penelitian ini juga memanfaatkan teori pengambilan keputusan dan kepentingan nasional, menghasilkan temuan bahwa setiap pemimpin negara memiliki perspektifnya sendiri terhadap suatu negara, yang



kemudian diuraikan melalui kepentingan nasional untuk menunjukkan bahwa kerjasama dapat terjadi jika terdapat kepentingan bersama (Ardiyanti et al., 2023).

Literature keenam adalah karya Imro'atul Mufidah dan Zaky Ismail dengan judul "Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Pembatalan Pemutusan Pakta Intelijen *General Security Of Military Information Agreement* Dengan Jepang Pada Tahun 2019" dari Jurnal SIYAR. Penelitian ini menggambarkan pembatalan perjanjian intelijen GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2019 dan membahas beberapa alasan yang diberikan oleh Korea Selatan untuk mengakhiri kerjasama tersebut. Keputusan ini terkait dengan meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea selama periode 2016-2019, yang menjadi faktor utama dalam pembatalan perjanjian. Perburukan situasi antara Korea Utara dan Korea Selatan disebabkan oleh kemajuan dalam pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara.

Meskipun upaya penyelesaian melalui KTT awalnya dilakukan untuk mengatasi isu senjata nuklir Korea Utara, namun kemudian menjadi buntu karena penolakan sanksi Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Oleh karena itu, pembatalan kerjasama dengan Jepang oleh Korea Selatan dapat dipahami sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan antara kedua Korea akibat kemajuan senjata nuklir oleh Korea Utara. Keputusan kebijakan luar negeri Korea Selatan ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori keamanan nasional, di mana tujuan kebijakan negara adalah untuk melindungi rakyat dari potensi ancaman darurat di masa

depan. Dalam konteks ini, kerjasama GSOMIA dianggap memberikan keuntungan bagi Korea Selatan dengan memungkinkan mereka memperoleh informasi dari Jepang mengenai aktivitas peningkatan nuklir di Korea Utara. Ini dianggap sebagai langkah penting dalam mengatasi kekhawatiran terhadap ancaman yang mungkin timbul dari Korea Utara (Mufidah & Ismail, 2022).

Literatur ketujuh, peneliti menggunakan penelitian yang berjudul “Strategi Donald Trump Dalam Reorientasi Kebijakan Keamanan Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara” oleh Timeria Zandrato dari *Journal of Diplomacy and International Studies*. Dalam penelitian tersebut, Zandrato menginvestigasi kebijakan Donald Trump terkait program pengembangan nuklir Korea Utara. Menurutnya, Amerika Serikat selalu mempertimbangkan partisipasi serta kerja sama strategis dengan Korea Selatan dan Jepang dalam merencanakan kebijakan keamanan di wilayah Asia Timur. Isu Semenanjung Korea dianggap sebagai tantangan krusial yang memiliki potensi mengancam kedamaian dan kepentingan nasional negara-negara tersebut. Zandrato menyoroti bahwa kebijakan keamanan di wilayah ini menjadi fokus vital bagi Amerika Serikat dalam beberapa tahun ke depan. Zandrato juga menjelaskan bahwa Trump memiliki lima opsi strategis untuk menghentikan program nuklir Korea Utara. Pertama, Trump dapat mengambil sikap pasif dan meneruskan strategi sebelumnya dengan menunggu respons Korea Utara untuk mencapai perjanjian denuklirisasi. Opsi kedua adalah menerapkan tindakan represif, seperti memberlakukan

sanksi, tekanan, dan kebijakan isolasi yang lebih kuat terhadap Korea Utara. Opsi ketiga adalah mendorong China untuk memberikan tekanan ekonomi dan politik kepada Korea Utara, dengan terus mendesak China untuk menggunakan kekuatannya sebagai pengaruh dalam menyelesaikan masalah nuklir. Opsi keempat adalah menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Opsi kelima adalah mencoba perundingan langsung dengan Pyongyang. Meskipun demikian, saat Korea Utara melakukan uji coba rudal dan mengancam akan menyerang markas militer Amerika Serikat di Guam pada pertengahan 2017, hal ini menunjukkan kegagalan Amerika Serikat dalam menghentikan ancaman keamanan dari Korea Utara. Beberapa pengamat berpendapat bahwa sementara sulit bagi Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan Korea Utara, bahaya dari masalah nuklir ini tidak bisa diabaikan. Trump menyatakan bahwa misinya adalah menangani masalah nuklir ini dari awal, mengingat tidak ada dialog yang terjalin sebelumnya. Hingga saat itu, upaya diplomasi, dialog, kerjasama, dan tekanan konvensional lainnya belum memberikan harapan bahwa Korea Utara akan menghentikan program senjata nuklirnya. Penelitian ini merujuk pada konsep smart power, menggabungkan aspek hard power dan soft power dari kebijakan para Presiden Amerika Serikat dalam menanggapi isu nuklir Korea Utara (Zendrato, 2021).

Literatur kedelapan peneliti menggunakan penelitian “Analisis Pengaruh Kebijakan *Extended Deterrence* Dalam Aliansi Amerika Serikat – Korea Selatan Terhadap Stabilitas Keamanan Di Asia Timur” dari IJGD:

*Indonesian Journal of Global Discourse* yang ditulis oleh Nizar Lukman, Mala Mardialina, dan Khairur Rizki. Penelitian ini mengeksplorasi dampak kebijakan extended deterrence dalam aliansi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Lukman, dkk., menjelaskan bahwa situasi keamanan di Asia Timur saat ini penuh ketegangan akibat konflik dominan antara negara-negara di kawasan tersebut. Konflik utama terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan, dua negara yang sebelumnya bersatu sebagai Korea sebelum terpecah karena campur tangan pihak lain. Selain itu, terdapat ketegangan dalam hubungan antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang yang menganut prinsip demokrasi, serta dalam hubungan Korea Utara dengan Rusia dan China yang memiliki ideologi komunis serupa. Hal ini berkontribusi pada ketidakstabilan di kawasan tersebut. Penelitian ini secara rinci menjelaskan isu extended deterrence menggunakan teori dan konsep regional security complex theory serta balance of power. Temuan penelitian menunjukkan bahwa stabilitas keamanan di Asia Timur dapat sepenuhnya tercapai jika negara-negara di kawasan tersebut mampu mengatasi ego dan saling curiga di antara mereka. Selain itu, keamanan di wilayah tersebut dapat menjadi lebih stabil dengan meminimalisir kebijakan Extended Deterrence dan pengaruh dominan Amerika Serikat. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat membangun rasa saling percaya di antara negara-negara di Asia Timur, yang pada akhirnya dapat mendorong terbentuknya regionalisme di wilayah tersebut (Lukman et al., 2020).

Literatur kesembilan yang berjudul “Quasi-Alliance at Play: The Curious Case of South Korea’s Aborted Withdrawal from GSOMIA in 2019” oleh Resi Qurrata Aini dan Yandry Kurniawan dari Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tentang kasus pembatalan perjanjian intelijen GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2019, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah alasan yang menjadi dasar keputusan Korea Selatan untuk keluar dari kerjasama tersebut. Keputusan ini dihubungkan dengan ketegangan yang meningkat di Semenanjung Korea pada periode 2016-2019, khususnya sebagai respons terhadap kemajuan dalam pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara. Walaupun terdapat upaya diplomatik melalui KTT untuk mengatasi isu senjata nuklir Korea Utara, situasinya menjadi sulit karena penolakan sanksi oleh Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Oleh karena itu, pembatalan GSOMIA oleh Korea Selatan dapat dijustifikasi sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan antara kedua Korea yang dipicu oleh kemajuan senjata nuklir Korea Utara. Kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam konteks ini dapat dianalisis dengan mempertimbangkan teori keamanan nasional, di mana negara bertujuan melindungi rakyatnya dari potensi ancaman darurat di masa mendatang. Dalam kerangka ini, penting bagi suatu negara untuk memiliki kekuatan militer yang memadai dan sumber daya yang digunakan untuk melindungi rakyat dari potensi bahaya. Kerjasama GSOMIA dianggap memberikan keuntungan bagi Korea Selatan dengan mendapatkan informasi dari Jepang terkait aktivitas peningkatan nuklir di Korea Utara, sebagai langkah strategis dalam mengatasi kekhawatiran

akan ancaman yang mungkin berasal dari negara tersebut(Aini & Kurniawan, 2019).

Literatur kesepuluh yang peneliti gunakan adalah “Analisis Kerentanan *General Security Of Military Information Agreement* (GSOMIA) Antara Korea Selatan Dan Jepang” yang ditulis oleh Refnedy Arpandi dari Jurnal Online Mahasiswa. Fokus dari penelitian ini berpusat pada kerjasama antara Korea Selatan dan Jepang melalui *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) dalam menghadapi ancaman nuklir dari Korea Utara di kawasan Asia Timur. Kedua negara ini, karena kedekatan geografisnya, memiliki persepsi yang serupa terhadap ancaman keamanan di wilayah tersebut, terutama dari program nuklir Korea Utara. GSOMIA dibentuk pada tahun 2016 dengan tujuan memonitor aktivitas nuklir Korea Utara di kawasan tersebut. Namun, pada tahun 2019, terjadi penarikan diri Korea Selatan dari GSOMIA, menolak melanjutkan kerjasama dengan Jepang, disebabkan oleh konflik bilateral yang memiliki akar sejarah dalam hubungan kedua negara. Menurut Arpandi, kerjasama ini sangat rentan dan mudah dipengaruhi oleh faktor sejarah dan konflik yang terjadi sebelumnya antara kedua negara, yang memengaruhi kelangsungan GSOMIA. Hal ini tercermin dalam keputusan Korea Selatan untuk menarik diri dari kerjasama tersebut dan memburuknya hubungan bilateral pada tahun 2019. Meskipun akhirnya GSOMIA tetap berlanjut, dengan klausul bahwa kedua negara dapat mengakhiri kerjasama kapan pun. Walaupun GSOMIA bertahan dan kerjasama dilanjutkan, Korea Selatan memiliki kekuasaan untuk

mengakhiri kerjasama ini kapan saja, dan Jepang telah menyetujui serta memahami kondisi ini. Kedepannya, perjanjian GSOMIA tidak lagi memiliki ketentuan untuk diperbaharui setiap tanggal 23 November, dan digantikan dengan kesepakatan bahwa kerjasama dapat diakhiri kapan saja. Keputusan ini diambil oleh Korea Selatan pada menit-menit terakhir sebelum kerjasama berakhir, dipengaruhi oleh tekanan dari Amerika Serikat. Dengan syarat dan ketentuan baru GSOMIA, kerjasama ini semakin rentan untuk berakhir, mengingat buruknya hubungan antara kedua negara. Konflik yang terkait dengan GSOMIA semakin memperkuat respon yang dipengaruhi oleh perasaan emosional, yang dapat menyebabkan melemahnya hubungan dan meningkatkan kekhawatiran bahwa penurunan hubungan bilateral ini akan berlanjut atau bahkan menjadi permanen karena semakin besar ketidakpercayaan dan permusuhan di antara keduanya (Arpandi, 2021).

Dalam skripsi ini, peneliti membahas keterlibatan Amerika Serikat dalam kawasan Asia Timur. Penelitian peneliti menitik beratkan kepada upaya Amerika Serikat dalam mempertahankan hegemoninya di kawasan Asia Timur, hal ini yang merupakan perbedaan penelitian peneliti dengan 10 penelitian diatas. Untuk mempermudah melakukan penelitian, peneliti membuat tabel tinjauan literatur untuk mengetahui pembanding dan penambah informasinya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur

No	Judul, Penulis, Penerbit	Rumusan Masalah, Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1.	<p>Kim Anna</p> <p><i>Understanding Japan–South Korea Cooperation and Friction Through Neoclassical Realist Theory,</i></p> <p>Jadavpur Journal of International Relations.</p>	<p>Apakah tindakan dari kedua negara tersebut mencerminkan prediksi dari teori realis neoklasik?</p> <p>Penelitian ini menggunakan teori/konsep <i>balance of threat</i> dan <i>quasi-alliance theory</i></p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas mengenai Kawasan Asia Timur dan keikutsertaan Amerika Serikat dalam permasalahan Asia Timur.</p>	<p>Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas terkait keikutsertaan Amerika Serikat sebagai pihak eksternal dalam kerjasama Jepang - Korea Selatan sedangkan penelitian peneliti lebih kearah upaya Amerika Serikat mempertahankan dominasinya melalui GSOMIA</p>	<p>Penelitian menegaskan bahwa teori quasi-alliance memberikan gambaran yang tepat tentang kerja sama dan ketegangan antarnegara di kawasan. Di era pemerintahan Obama, kekhawatiran atas komitmen AS meningkat akibat pengurangan belanja militer dan ketidakpastian terhadap China dan Korea Utara. Hal ini sesuai dengan teori tersebut, di mana ketidakpastian perlindungan bisa mendorong kerja sama regional. Meskipun AS keluar dari TPP, komitmen militer di Jepang dan Korea Selatan tetap kuat, namun hal ini dapat memperburuk ketidaksesuaian di antara kedua negara. Konflik politik mereka meluas ke bidang ekonomi, menyebabkan perselisihan perdagangan.</p>



No	Judul, Penulis, Penerbit	Rumusan Masalah, Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
					Perbaikan hubungan bergantung pada langkah AS, khususnya terkait kehadiran militernya di kawasan. Studi mendalam tentang teori realis neoklasik diharapkan dapat membantu pemahaman lebih baik terhadap konflik regional ini.
2.	<p>Matheo Manoe, Triesanto Romulo Simanjuntak, dan Putri Hergianasari,</p> <p>Nuklir Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Kim Jong-Un Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Internasional,</p> <p>Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebijakan.</p>	<p>Bagaimana dampak nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong-Un terhadap stabilitas keamanan internasional?</p> <p>Penelitian ini menggunakan teori/konsep realisme defensif dan <i>balance of power</i>.</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan pembahasan yaitu nuklir Korea Utara yang menimbulkan dampak <i>security dilemma</i> bagi negara lain.</p>	<p>Perbedaan penelitian Manoe, dkk., dengan peneliti adalah penelitian peneliti memfokuskan dampak nuklir korea utara hanya di kawasan Asia Timur sedangkan untuk Manoe, dkk., lebih mengarah kearah internasional.</p>	<p>Sikap Korea Utara dalam menerapkan kebijakan nuklirnya dapat dijelaskan melalui teori realisme defensif dan konsep <i>balance of power</i>. Kebijakan nuklir yang agresif namun dijustifikasi sebagai langkah pertahanan dan penangkalan, memiliki potensi untuk mengganggu keseimbangan kekuatan di Asia Timur. Pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara berpotensi menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya, mendorong mereka untuk</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Rumusan Masalah, Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
					meningkatkan kemampuan militer mereka sebagai respons. Respons ini dapat memicu perlombaan persenjataan yang pada akhirnya meningkatkan ketidakstabilan di kawasan karena negara-negara merasa cemas terhadap tindakan masing-masing dan rentan untuk mengambil langkah pencegahan melalui serangan militer untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar.
3.	<p>Mohammad Jody Kusuma dan Sylvia Octa Putri,</p> <p>Upaya Peluncuran Senjata Nuklir Korea Utara Oleh Amerika Serikat 2016 – 2019,</p> <p><i>Global Political Studies Journal.</i></p>	<p>Apa kepentingan Amerika Serikat dalam peluncuran senjata nuklir Korea Utara?</p> <p>Bagaimana kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat dalam peluncuran senjata nuklir Korea Utara?</p> <p>Bagaimana respon Korea Utara terhadap pilihan kebijakan Amerika Serikat dalam peluncuran senjata nuklir Korea Utara?</p> <p>Penelitian ini menggunakan teori/konsep yaitu Politik Luar Negeri, Kebijakan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Kusuma dan Putri memiliki kesamaan aktor yaitu Amerika Serikat dan Korea Utara dan tindakan Amerika Serikat yang melakukan peluncuran senjata terhadap Korea Utara.</p>	<p>Perbedaannya adalah alur penelitian, Kusuma dan Putri melakukan penelitian hanya sampai pada tindakan Korea Utara yang membuat Amerika Serikat merasakan <i>security dilemma</i> sehingga menimbulkan reaksi Amerika Serikat dengan cara melakukan peluncuran senjata nuklir, untuk penelitian peneliti adalah aksi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Korea Utara selanjutnya yaitu kerjasama <i>General Security of Information Military Agreement</i> (GSOMIA).</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa Korea Utara memilih untuk meningkatkan kemampuan militernya dengan mengembangkan senjata nuklir dan rudal dalam upaya untuk membangun keseimbangan kekuatan. Meskipun Amerika Serikat berusaha untuk memaksa Korea Utara melucuti persenjataan nuklirnya melalui strategi</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Rumusan Masalah, Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
		Luar Negeri, Kepentingan Nasional dan Denuklirisasi			"Tekanan Maksimum dan Keterlibatan", upaya ini terbukti tidak berhasil. Kegagalan ini disebabkan oleh fakta bahwa jaminan keamanan yang diberikan oleh Amerika Serikat tidak sesuai dengan perubahan kebijakan komprehensif yang dituntut oleh Korea Utara untuk pelucutan nuklir secara menyeluruh.
4.	Ngafifatul Khanafi dan Erna Kurniawati, Kerjasama <i>General Security Of Information Agreement</i> (GSOMIA) Korea Selatan – Jepang 2016 : Perspektif Korea Selatan, Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan.	Mengapa Korea Selatan akhirnya menyetujui perjanjian GSOMIA dengan Jepang pada tahun 2016? Penelitian ini menggunakan teori/konsep <i>decision making</i>	Penelitian Khanafi dan Kurniawati memiliki kesamaan topik pembahasan yaitu kerjasama GSOMIA dan alasan bergabungnya Korea Selatan dalam kerjasama GSOMIA.	Perbedaan dalam penelitian terdapat di aktornya, Khanafi dan Kurniawati melihat kerjasama GSOMIA dari sudut pandang Korea Selatan sedangkan peneliti melihat dari sudut pandang Amerika Serikat.	Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam menjalin kerjasama dengan negara lain, pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai alasan sebagai faktor pertimbangan. Sebagai aktor yang rasional, seorang presiden atau pemimpin memperhitungkan sejumlah informasi dan mengkalkulasi konsekuensi dari masing-masing kebijakan yang dapat dipilih, termasuk keuntungan dan kerugian yang mungkin

No	Judul, Penulis, Penerbit	Rumusan Masalah, Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
					<p>timbul. Karenanya, pengambilan keputusan pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh aktor rasional seperti seorang presiden. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berbeda bisa menghasilkan kebijakan yang berbeda meskipun dalam situasi yang serupa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pertimbangan yang dilakukan oleh masing-masing aktor, yang didasarkan pada rasionalitas individu pembuat kebijakan. Dalam konteks hubungan internasional, pemahaman tentang proses pengambilan keputusan oleh aktor rasional sangat penting karena hal ini merupakan bagian integral dari perilaku suatu negara sebagai aktor dalam hubungan internasional.</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Rumusan Masalah, Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
5.	<p>Dwi Ardiyanti, Hesti Rokhaniyah, dan Sindi Dini Danae,</p> <p><i>Impact Of GSOMIA (General Security Of Military Information Agreement) terhadap dinamika hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan?</i></p> <p><i>International Journal of Educational Research &amp; Social Sciences.</i></p>	<p>Bagaimana dampak setelah adanya GSOMIA (General Security of Military Information Agreement) terhadap dinamika hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan?</p> <p>Penelitian ini menggunakan teori/konsep <i>nation interest</i> dan <i>decision making</i></p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai GSOMIA dan penerimaan kembali Korea Selatan di GSOMIA setelah menolak bergabung pada tahun 2012.</p>	<p>Penelitian Ardiyanti, dkk., lebih terfokuskan pada sejarah terbentuknya GSOMIA dan penelitian ini mengarah kepada kerjasama bilateral sedangkan peneliti lebih memfokuskan Amerika Serikat di GSOMIA sehingga kerjasama ini menjadi kerjasama trilateral karena adanya keikutsertaan Amerika Serikat dalam kerjasama GSOMIA.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan perbedaan kebijakan publik antara Jepang dan Korea Selatan terkait Kerjasama GSOMIA. Korea Selatan menunda perjanjian ini dalam masa pemerintahan Lee Myung-bak karena memprioritaskan opini publik, yang berdampak buruk pada reputasinya dan membuatnya mundur dari jabatannya. Sementara pada masa pemerintahan Park Geun-hye, GSOMIA disetujui pada tahun 2016, meskipun menghadapi kritik publik. Namun, skandal politik merugikan pandangan publik terhadapnya, dan dia dipecat dari jabatannya. Di sisi Jepang, meskipun mengalami penundaan pada tahun 2012, mereka tetap terbuka untuk menyetujui GSOMIA. Mereka melihat perjanjian ini penting untuk mengatasi</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Rumusan Masalah, Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
					ancaman nuklir dari Korea Utara dan meningkatkan hubungan bilateral dengan Korea Selatan. Jepang percaya GSOMIA adalah kunci bagi keamanan keduanya dan potensial untuk memperbaiki hubungan bilateral.
6.	<p>Imro'atul Mufidah dan Zaky Ismail,</p> <p>Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Pembatalan Pemutusan Pakta Intelijen <i>General Security Of Military Information Agreement</i> Dengan Jepang Pada Tahun 2019,</p> <p>Jurnal SIYAR.</p>	<p>Mengapa Korea Selatan Tidak Jadi Menarik Diri dari Pakta Intelijen <i>General Security of Military Information Agreement</i> pada Tahun 2019?</p> <p>Penelitian ini menggunakan teori/konsep kebijakan luar negeri</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu bagaimana Korea Selatan mau melakukan kerjasama dengan Jepang meskipun memiliki sejarah yang buruk</p>	<p>Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian ini terletak pada aktor GSOMIA yang terlibat, dalam tulisan ini hanya terfokus pada Korea Selatan dan penarikan dirinya di GSOMIA akibat tindakan yang dilakukan oleh Jepang.</p>	<p>Kesimpulan utama dari pentingnya Korea Selatan dalam mempertahankan GSOMIA adalah demi keamanan nasionalnya. Dalam konteks teori kebijakan luar negeri yang digagas oleh James N. Rosenau, ada lima variabel yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Korea Selatan terkait GSOMIA. Pertama, variabel individu menyoroti peran karakter Presiden Moon Jae-in yang dianggap progresif, logis, dan rasional dalam pengambilan keputusan. Kedua, peran dari Menteri Luar Negeri</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Rumusan Masalah, Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
					<p>dan Menteri Pertahanan Korea Selatan dalam merumuskan kebijakan luar negeri menjadi variabel kedua. Ketiga, variabel sosial mencakup persepsi bahwa GSOMIA dapat mengurangi ketakutan dan ketegangan masyarakat Korea Selatan terhadap ancaman nuklir dari Korea Utara. Keempat, variabel sistemik mencakup hubungan aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat yang mempengaruhi kebijakan luar negeri mereka terhadap Korea Utara. Dan kelima, variabel pemerintahan menyoroti dukungan lembaga eksekutif dan legislatif di Korea Selatan terhadap kelanjutan GSOMIA dengan Jepang.</p>
7.	<p>Timeria Zentrato,  Strategi Donald Trump Dalam Reorientasi Kebijakan</p>	<p>Bagaimana upaya Donald Trump dalam mengatasi program pengembangan nuklir Korea Utara?</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan aktor yaitu Amerika Serikat, serta pembahasan mengenai</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak di fokus utama di mana Zentrato membahas mengenai kebijakan keamanan Amerika Serikat dan strategi presiden Donald</p>	<p>Korea Utara memandang absennya Amerika Serikat dalam upaya denuklirisasi sebagai</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Rumusan Masalah, Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
	Keamanan Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara,  <i>Journal of Diplomacy and International Studies</i>	Penelitian ini menggunakan teori/konsep <i>Smart Power</i>	program nuklir Korea Utara.	Trump sedangkan peneliti membahas terkait kerjasama GSOMIA.	persetujuan terhadap kepemilikan senjata nuklir mereka. Donald Trump menghadapi perlunya perubahan strategis yang signifikan setelah kegagalan sebelumnya dalam menghentikan program nuklir Korea Utara. Strategi yang diusungnya, yaitu "maximum pressure" dan perjanjian, mencoba menciptakan kebijakan "smart power" dengan menggabungkan pendekatan diplomatik, sanksi, dan bahkan ancaman kekuatan militer untuk memaksa Pyongyang berhenti dari program senjata nuklirnya.
8.	Nizar Lukman, Mala Mardialina, dan Khairur Rizki,  Analisis Pengaruh Kebijakan Extended Deterrence Dalam Aliansi Amerika Serikat – Korea Selatan Terhadap Stabilitas	Bagaimana pengaruh kebijakan <i>extended deterrence</i> dalam aliansi amerika serikat-korea selatan terhadap stabilitas keamanan di asia timur?  penelitian ini menggunakan teori/konsep <i>regional security complex theory</i>	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu penggunaan teori <i>regional security complex theory</i> serta memiliki kesamaan aktor yaitu Amerika dan Korea Selatan.	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan ke <i>extended deterrence</i> sedangkan penelitian peneliti membahas terkait dominasi AS melalui GSOMIA.	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Extended Deterrence dalam aliansi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan menyebabkan ketidakselarasan dan memperdalam ketegangan



No	Judul, Penulis, Penerbit	Rumusan Masalah, Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
	Keamanan Di Asia Timur Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara,  IJGD: <i>Indonesian Journal of Global Discourse</i>	dan <i>balance of power</i>			yang semakin kompleks di Asia Timur. Hal ini menghambat pencapaian stabilitas keamanan yang memadai. Meskipun mendapat reaksi negatif dari beberapa negara terhadap kebijakan ini, tidak ada tanda-tanda kerjasama yang signifikan di kawasan Asia Timur selama kebijakan Extended Deterrence diterapkan. Ini mengindikasikan bahwa stabilitas keamanan di wilayah tersebut terganggu secara substansial, terutama akibat penerapan kebijakan Extended Deterrence dalam aliansi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan.
9.	Resi Qurrata Aini dan Yandry Kurniawan,  <i>Quasi-Alliance at Play: The Curious Case of South Korea's Aborted Withdrawal</i>	Bagaimana faktor pengunduran diri Korea Selatan di GSOMIA pada tahun 2019?  Penelitian ini menggunakan teori/konsep <i>abandonment fears</i> .	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu aktor GSOMIA yang terlibat, dan sejarah GSOMIA bisa terjadi.	Perbedaan penelitian yang terdapat di tulisan peneliti dengan penelitian ini adalah penggunaan teori serta aktor, penulis menggunakan <i>reginal security complex</i> dan aktornya Amerika Serikat sedangkan penelitian ini aktornya adalah Korea Selatan dan	Korea Selatan merespons ancaman dari Korea Utara dengan serius, namun dihadapkan pada ketidakpastian politik di wilayah tersebut dan keraguan

No	Judul, Penulis, Penerbit	Rumusan Masalah, Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
	<p>from GSOMIA in 2019, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.</p>			<p>menggunakan konsep <i>Abandonment Fears</i>.</p>	<p>terhadap komitmen Amerika Serikat. Keluar dari aliansi berarti menghadapi ancaman tersebut tanpa dukungan, yang sulit dilakukan mengingat kemampuan militer internal yang belum sebanding dengan negara tetangga. Namun, karena tidak ada alternatif aliansi yang layak, Korea Selatan terpaksa mempertahankan kemitraannya dengan Jepang, meskipun terdapat konflik sejarah di antara keduanya. Meskipun rumit, mempertahankan hubungan ini menjadi pilihan terbaik dalam situasi ketidakpastian politik regional, karena mengorbankannya akan memberikan beban besar bagi Korea Selatan. Dalam menghadapi dinamika keamanan yang rumit, mempertahankan hubungan dengan Jepang</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Rumusan Masalah, Teori/Konsep	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
					tetap menjadi pilihan praktis meskipun tidak sempurna bagi Korea Selatan.
10	Refnedy Arpandi dan Yessi Olivia, Analisis Kerentanan <i>General Security Of Military Information Agreement</i> (GSOMIA) Antara Korea Selatan Dan Jepang, Jurnal Online Mahasiswa.	Bagaimana hubungan Korea Selatan dan Jepang dalam kerjasama GSOMIA jika ditinjau dari sejarah? Penelitian ini menggunakan teori/konsep <i>Copenhagen School</i> dan <i>Regional Security Complex</i>	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu pembahasan kerjasama GSOMIA yang terjadi di Asia Timur sebagai respon perkembangan nuklir Korea Utara. Teori yang digunakan di penelitian ini juga memiliki kesamaan.	Perbedaan penelitian peneliti dan penelitian ini terdapat pada teori di mana Arpandi menggunakan konsep <i>Copenhagen School</i> sedangkan peneliti tidak menggunakan konsep tersebut melainkan menggunakan hegemoni karena ada dominasi dari Amerika Serikat.	Penelitian ini menekankan bahwa faktor sejarah memainkan peran sentral dalam kerjasama antara Korea Selatan dan Jepang melalui GSOMIA. Meskipun sengketa awalnya berawal dari masalah dagang, sejarah konflik panjang antara kedua negara menjadi faktor utama dalam setiap keputusan terkait GSOMIA. Meskipun pentingnya kerjasama keamanan regional, sejarah konflik tetap mempengaruhi kesepakatan GSOMIA, menunjukkan kerapuhannya. Meskipun vital untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara, animositas historis terus menjadi pertimbangan utama dalam keputusan terkait kesepakatan ini.

## 2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

### 2.2.1 Regional Security Complex Theory

Kompleksitas keamanan kawasan merujuk pada dinamika keamanan di antara sejumlah negara yang terbatas pada suatu wilayah tertentu. Hal ini melibatkan interaksi keamanan antara satu negara dengan negara lainnya, menciptakan pola interaksi yang rumit. Fokus dari teori kompleksitas keamanan kawasan mengacu pada pembentukan kompleksitas keamanan di suatu wilayah. Teori ini menjadi dasar untuk memahami kompleksitas fenomena keamanan di kawasan Asia Timur.

Menurut Buzan dan Waever dalam buku "Regions and Powers: The Structure of International Security", sebuah kawasan tidak hanya merujuk pada aspek teritorial saja tetapi didefinisikan juga sebagai konsep yang melibatkan proses proteksionisme, desekuritisasi, dan interaksi antarnegara yang saling terhubung dan berhubungan satu sama lain di dalamnya. Masalah keamanan negara-negara dalam kawasan tersebut juga tidak bisa dianalisis secara terpisah.

Buzan dan Waever juga menyatakan bahwa hubungan keamanan serta adanya bentuk interaksi saling ketergantungan antar negara dalam suatu kawasan dapat terjadi akibat beberapa sector seperti geografis, etnisitas, dan budaya masyarakat yang kemudian memicu hingga menimbulkan rivalitas keamanan kawasan.

Hadirnya pola ketergantungan antarnegara dalam kompleksitas keamanan kawasan ini tidak secara langsung menghilangkan hubungan yang selalu diwarnai persaingan dan kecurigaan, *balance of power*, pembentukan aliansi, maupun masuknya kekuatan eksternal. Maka dari itu disebutkan bahwa kompleksitas keamanan dibentuk melalui 4 struktur dasar yaitu:

1. Kedekatan geografis
2. Anarkisme kawasan
3. Polarisasi kekuatan
4. Konstruksi sosial yang digambarkan melalui pola hubungan amity (persahabatan) dan enmity (permusuhan)

Meskipun terdapat ketergantungan antarnegara dalam kompleksitas keamanan kawasan, hal ini tidak menghapuskan hubungan yang selalu diwarnai oleh persaingan, kecurigaan, perimbangan kekuatan, aliansi kekuatan, dan campur tangan kekuatan dari luar. Karenanya, kompleksitas keamanan tersebut terbentuk melalui empat struktur dasar, yaitu kedekatan geografis, anarkisme kawasan, polarisasi kekuatan, dan juga konstruksi sosial yang tercermin dalam pola hubungan amity (persahabatan) dan enmity (permusuhan).

Dalam konteks penelitian ini, teori kompleksitas keamanan kawasan menekankan pada persepsi bersama mengenai ancaman yang dihadapi oleh negara-negara dalam suatu kawasan. Teori ini

bermanfaat untuk memahami bagaimana persepsi terhadap dinamika keamanan di kawasan Asia Timur yang kompleks (Buzan & Wæver, 2003).

### **2.2.2 Kerjasama Keamanan**

Dalam studi Hubungan Internasional, kerjasama keamanan di antara negara-negara menjadi hal penting dalam menghadapi ancaman keamanan yang kompleks. Keamanan bukan hanya tentang aspek militer, tetapi juga melibatkan identitas dan integritas suatu negara serta masyarakatnya. Dalam konteks ini, negara-negara cenderung berinteraksi satu sama lain baik melalui kerjasama kooperatif maupun kompetitif untuk mengatasi ancaman keamanan yang ada di kawasan.

John Gerard Ruggie, seorang ahli teori Hubungan Internasional, menyoroti pentingnya multilateralisme dalam konteks keamanan kawasan. Multilateralisme adalah pendekatan di mana negara-negara berinteraksi dan bekerjasama dalam forum-forum multilateral untuk mengatasi masalah bersama. Dalam hal keamanan, kerjasama multilateral dianggap sebagai cara yang lebih efektif dalam memperkuat stabilitas dan perdamaian internasional.

Kerjasama multilateral seperti GSOMIA yang memberikan platform bagi negara-negara untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan mengembangkan kerangka kerjasama dalam menangani ancaman keamanan yang ada. Melalui kerjasama multilateral, negara-negara

dapat saling mendukung, berbagi informasi, dan melakukan langkah-langkah yang koordinatif untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut (Ruggie, 1992).

Menurut *Agreement* yang dicetuskan oleh *Ministry of Foreign Affairs of Japan* kerjasama keamanan ini merupakan bentuk pertukaran informasi yang dimana bertuliskan “Setiap data yang terkait dengan pertahanan yang dihasilkan oleh atau untuk digunakan atau dipegang oleh Otoritas yang Berwenang dari Pemerintah Jepang atau Pemerintah Republik Korea, dan memerlukan perlindungan untuk kepentingan keamanan nasional dari masing-masing Pihak. Data tersebut harus diberi klasifikasi keamanan, dan jika perlu, penandaan yang sesuai untuk mengidentifikasi data tersebut sebagai CMI (Critical Military Information). Data tersebut dapat berupa informasi lisan, visual, elektronik, magnetik, atau dalam bentuk dokumen, atau dalam bentuk peralatan atau teknologi” dari tulisan tersebut memiliki korelasi dengan pendapat Ruggie G, dimana “Multilateralisme adalah pendekatan di mana negara-negara berinteraksi dan bekerjasama dalam forum-forum multilateral untuk mengatasi masalah bersama” karena GSOMIA sendiri hadir untuk mengatasi permasalahan uji coba nuklir Korea Utara yang mengakibatkan *security dilemma* bagi Jepang dan Korea Selatan.

### 2.2.3 Hegemoni Stability Theory

Teori Hegemoni pada dasarnya adalah suatu kondisi di mana satu negara memiliki hegemoni di bidang militer dan ekonomi. Hegemoni ini tidak hanya diukur dari kekuatan militer dan ekonomi secara absolut, tetapi juga dari rasio kekuatannya terhadap negara-negara lain. Ikenberry berpendapat bahwa hegemoni memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan internasional. Hegemoni dapat memberikan aturan dan tatanan yang dapat disepakati oleh semua negara. Dengan demikian, hegemoni dapat mencegah terjadinya konflik dan perang (Ikenberry, 1989).

Menurut Ikenberry sendiri bahwa hegemoni tidak bersifat abadi. Hegemoni dapat mengalami tantangan baik dari dalam maupun luar, dan struktur kekuasaan dalam sistem internasional selalu berubah seiring waktu. Oleh karena itu, Ikenberry mempertimbangkan pentingnya adaptasi dan respons yang cerdas dari negara-negara hegemonik untuk mempertahankan hegemoninya dalam jangka panjang. Ikenberry juga menyajikan 4 indikator untuk melihat hegemoni negara dominan yaitu;

- Regime Creation: Hegemoni dapat menciptakan rezim internasional yang mencerminkan atau mempromosikan nilai-nilai, norma, aturan, dan struktur yang menguntungkan bagi kepentingan hegemon. Pembentukan rezim semacam itu



memungkinkan hegemon untuk memperkuat posisinya dalam sistem internasional.

- **Maintenance:** Upaya untuk mempertahankan dan mengkonsolidasikan kekuasaan dalam sistem internasional. Ini melibatkan penggunaan kekuatan dan pengaruh untuk mempertahankan aturan, norma, dan struktur yang menguntungkan bagi kepentingan hegemon.
- **Enforcement:** Kemampuan untuk menegakkan kebijakan, aturan, dan norma yang telah dibentuk dalam sistem internasional. Hegemon memiliki kekuatan dan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk memaksa atau mengarahkan negara-negara lain untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
- **Durability:** Hegemoni yang kuat harus memiliki ketahanan terhadap tantangan internal maupun eksternal. Daya tahan tersebut mencakup kemampuan untuk bertahan dari tekanan atau perubahan dalam sistem internasional, menjaga keunggulan relatif, dan mempertahankan pengaruhnya dalam jangka waktu yang panjang.

Ikenberry juga menyoroti bahwa hegemoni tidak hanya menguntungkan bagi negara dominan itu sendiri, tetapi juga dapat

memberikan manfaat bagi negara-negara lain dalam sistem internasional. Sehingga hegemoni dalam pandangan Ikenberry, dapat menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran yang lebih luas bagi masyarakat internasional karena mempromosikan norma-norma dan aturan-aturan yang mendukung kerjasama (Ikenberry, 2001).

Dalam penjelasan diatas dapat dilihat bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam setiap kerjasama baik organisasi internasional maupun sebuah kawasan merupakan tindakan untuk memperlihatkan secara langsung mengenai hegemoninya. Karena adanya perkembangan nuklir Korea Utara mengacaukan stabilitas keamanan internasional maka dibutuhkan keikutsertaan Amerika Serikat ditinjau untuk mempertahankan stabilitas keamanan international. Hal ini juga merupakan upaya Amerika Serikat agar tidak kehilangan hegemoninya di kawasan Asia Timur.

### **2.3 Asumsi Penelitian**

Kerjasama yang dibangun oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang melalui *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) ini terjalin karena keadaan kompleksitas dinamika keamanan kawasan Asia Timur yang diakibatkan oleh perilaku Korea Utara melalui program pengembangan senjata nuklirnya. Melihat keterlibatan Amerika Serikat melalui GSOMIA, hal ini menggambarkan bentuk hegemoni yang di lakukan Amerika Serikat di Asia Timur. Tentunya Amerika Serikat tidak ingin kehilangan kekuasaanya di kawasan Asia Timur. Dalam

konteks geopolitik dan keamanan internasional, kerjasama GSOMIA (General Security of Military Information Agreement) dapat diinterpretasikan sebagai upaya Amerika Serikat untuk memperkuat hegemoninya di kawasan Asia Timur. Dengan adanya kerjasama ini, posisi Amerika Serikat sebagai aktor dominan dalam isu-isu keamanan regional semakin terlegitimasi, seiring dengan peningkatan kerjasama militer dan pertukaran informasi keamanan dengan negara-negara di kawasan tersebut.

## 2.4 Kerangka Analisis

